

## STRATEGI NASIONAL KEUANGAN INKLUSIF TERHADAP PEMBERDAYAAN EKONOMI PEREMPUAN

21

Sali Susiana\*

### Abstrak

*Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) menjadi salah satu strategi mengakhiri kemiskinan pada perempuan melalui pemberdayaan ekonomi perempuan. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui implementasi SNKI terhadap pemberdayaan ekonomi perempuan berdasarkan dimensi dan indikator yang terdapat dalam SNKI. Dari dimensi penggunaan, dengan indikator jumlah nasabah penerima kredit Ultra Mikro (UMi), 6,4 juta orang (95%) penerima program UMi adalah perempuan. Dari dimensi kualitas, dengan indikator berupa indeks literasi keuangan, indeks literasi perempuan lebih tinggi dibanding laki-laki. Sementara itu dari dimensi jangkauan akses, dua indikator yaitu persentase kepemilikan telepon seluler dan jumlah pengguna internet, perempuan masih tertinggal dibanding laki-laki. Hal ini menunjukkan masih adanya kesenjangan digital, sehingga diperlukan literasi digital bagi perempuan. Melalui fungsi pengawasan, DPR RI terutama Komisi VIII dan Komisi I perlu terus mendorong pemerintah untuk meningkatkan literasi digital perempuan.*

### Pendahuluan

Tanggal 8 Maret diperingati sebagai Hari Perempuan Internasional. Tema tahun ini menurut the United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women (UN Women) yaitu “Invest in Women: Accelerate Progress” atau “Berinvestasi pada Perempuan: Mempercepat Kemajuan” (Mutiarasari, 2024). Menurut UN Women, terdapat

lima bidang utama yang memerlukan tindakan bersama untuk memastikan perempuan tidak tertinggal, salah satunya yaitu mengakhiri kemiskinan. Pandemi Covid-19, konflik geopolitik, bencana iklim, dan gejolak ekonomi, telah menyebabkan 75 juta orang jatuh ke dalam kemiskinan parah sejak tahun 2020.

Perempuan Indonesia merupakan bagian dari perempuan dunia,



9 772088 235001

\* Analisis Legislatif Ahli Utama Bidang Kesejahteraan Rakyat Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI. E-mail: sali.susiana@dpr.go.id.

termasuk perempuan yang hidup dalam kemiskinan. Data terakhir dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan jumlah penduduk miskin pada Maret 2022 sebesar 26,16 juta orang (Indonesia. BPS, 2022a). Dari jumlah tersebut, persentase perempuan yang hidup di bawah garis kemiskinan lebih banyak daripada laki-laki, yaitu sebesar 9,65%. Sementara persentase laki-laki yang hidup di bawah garis kemiskinan sebesar 9,29% (Indonesia. BPS, 2022b).

Untuk mengurangi kemiskinan pada perempuan, pemerintah telah melaksanakan berbagai program penanggulangan kemiskinan. Program ini menekankan aspek pemberdayaan ekonomi perempuan, termasuk akses perempuan terhadap layanan lembaga keuangan melalui kebijakan keuangan yang inklusif. Terkait keuangan inklusif, terdapat Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) yang kemudian diperbarui dengan Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2020. Tulisan akan membahas mengenai implementasi SNKI terhadap pemberdayaan ekonomi perempuan berdasarkan dimensi dan indikator yang terdapat dalam SNKI.

### **SNKI dan SNKI Perempuan**

Keuangan inklusif didefinisikan sebagai kondisi ketika masyarakat mempunyai akses terhadap berbagai produk dan layanan keuangan formal yang berkualitas secara tepat waktu, lancar dan aman, dengan biaya terjangkau sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat (snki.go.id, 2017). Pemerintah Indonesia telah memulai inisiatif penyusunan dokumen Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) sejak tahun 2022. SNKI ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi

Nasional Keuangan Inklusif. Peraturan ini kemudian diperbarui dengan Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (snki.go.id, 2017). SNKI merupakan strategi nasional yang memuat tujuan, cara mencapai tujuan, sasaran, dan target keuangan inklusif dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi, percepatan penanggulangan kemiskinan, dan pengurangan kesenjangan antarindividu dan antardaerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Untuk mempertajam pelaksanaan SNKI khusus untuk perempuan, telah diluncurkan SNKI Perempuan pada 9 Juni 2020 (snki.go.id, 2020). SNKI Perempuan semakin menegaskan bahwa segmen perempuan merupakan salah satu segmen prioritas dalam peningkatan keuangan inklusif di Indonesia. SNKI Perempuan memiliki visi untuk memastikan bahwa semua perempuan di Indonesia memiliki pengetahuan, kapasitas, sumber daya, dan peluang untuk mencapai dan menikmati pemberdayaan ekonomi yang merujuk pada kesetaraan gender.

SNKI Perempuan disusun berdasarkan banyaknya intervensi yang mempertimbangkan kesenjangan gender dan faktor-faktor yang menghambat perempuan untuk mengakses dan mendapatkan manfaat dari berbagai produk dan layanan keuangan, padahal akses layanan keuangan tersebut sangat penting agar perempuan dapat keluar dari kemiskinan (Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, tanpa tahun). Kelompok sasaran

perempuan yang menjadi target intervensi pelaksanaan SNKI Perempuan dibagi ke dalam empat kategori, yaitu: 1) perempuan dalam kelompok pendapatan 40% terendah; 2) perempuan pekerja, terutama pekerja migran; 3) perempuan pemilik usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM); dan 4) perempuan pengurus rumah tangga.

SNKI Perempuan memiliki area prioritas yaitu: (1) edukasi dan literasi keuangan; (2) dukungan untuk UMKM perempuan; (3) layanan keuangan digital untuk perempuan; (4) memperluas akses ke asuransi dan dana pensiun; (5) perlindungan konsumen; (6) dukungan komprehensif dan pemberdayaan bagi perempuan pengurus rumah tangga (*caregiver*); dan (7) pengumpulan data terpilah berdasarkan gender (Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, tanpa tahun).

### Implementasi SNKI

Belum ditemukan data mengenai implementasi SNKI Perempuan. Oleh karena itu akan diuraikan implementasi SNKI secara umum. Berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Strategi Nasional Keuangan Inklusif, indikator kinerja utama keuangan inklusif dikelompokkan menjadi tiga dimensi, yaitu: (1) jangkauan akses; (2) penggunaan; dan (3) kualitas. Masing-masing dimensi ini memiliki beberapa indikator. Indikator yang terdapat dalam ketiga dimensi tersebut dapat digunakan untuk mengetahui bagaimana implementasi SNKI terhadap

pemberdayaan ekonomi perempuan selama ini.

Dari dimensi jangkauan akses, yaitu kemampuan untuk menggunakan layanan keuangan formal dalam hal keterjangkauan secara fisik dan biaya, terdapat beberapa indikator, antara lain jumlah pengguna telepon seluler aktif per 100.000 (seratus ribu) penduduk dewasa dan jumlah pengguna internet per 100.000 (seratus ribu) penduduk dewasa. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, persentase penduduk berumur 5 tahun ke atas yang memiliki/ menguasai telepon seluler dalam 3 bulan terakhir lebih tinggi laki-laki dibandingkan dengan perempuan, yaitu 71,94% berbanding 62,62% (Indonesia. BPS, 2023). Demikian pula dengan jumlah pengguna internet. Persentase penduduk berumur 5 tahun ke atas yang pernah menggunakan internet dalam 3 bulan terakhir (termasuk facebook, whatsapp, youtube, dan instagram) lebih tinggi laki-laki dibandingkan dengan perempuan, yaitu 72,07% dibanding 66,35% (Indonesia. BPS, 2023).

Selanjutnya, dimensi penggunaan, yaitu penggunaan aktual atas layanan dan produk keuangan, antara lain diukur dengan indikator jumlah nasabah Kredit Usaha Rakyat (KUR)/KUR Syariah dan Ultra Mikro (UMi). Data Kementerian Keuangan tahun 2022 mencatat bahwa kurang lebih 97% penerima pembiayaan UMi adalah perempuan (Patnistik, 2022). Data lain menunjukkan 6,4 juta orang atau 95% penerima program UMi adalah perempuan, dengan total nilai pembiayaan mencapai lebih dari Rp22 triliun (Indonesia. Kementerian Keuangan, 2022).

Terakhir, dimensi kualitas, yaitu tingkat pemenuhan kebutuhan

atas produk dan layanan keuangan yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, diukur dengan indikator indeks literasi keuangan. Berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) tahun 2022 yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan, indeks literasi keuangan perempuan tahun 2022 untuk pertama kalinya melampaui indeks literasi keuangan laki-laki, yaitu sebesar 50,33%, sedangkan laki-laki 49,05% (Intan, 2022). Berdasarkan indikator yang terdapat dalam ketiga dimensi SNKI, terlihat bahwa dari dimensi kedua dan ketiga, yaitu penggunaan dan kualitas, terdapat peningkatan yang signifikan. Persentase perempuan sebagai penerima program UMi lebih tinggi dibanding laki-laki. Demikian juga dengan indeks literasi keuangan.

Sementara itu, dari indikator dimensi yang pertama, yaitu jangkauan akses, indikator berupa persentase kepemilikan telepon seluler dan jumlah pengguna internet pada perempuan masih lebih rendah dibanding laki-laki. Hal ini menunjukkan masih adanya kesenjangan digital pada perempuan (Suryarandika, 2022). Untuk mengatasi kesenjangan digital ini, diperlukan literasi digital sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan pengetahuan teknologi digital bagi perempuan (Rizkinaswara, 2020). Oleh karena itu diperlukan peran pemerintah, melalui kerja sama antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk meningkatkan literasi digital pada perempuan.

## Penutup

Analisis terhadap implementasi SNKI terhadap pemberdayaan ekonomi perempuan berdasarkan dimensi dan indikator yang terdapat dalam SNKI menunjukkan, dari dimensi penggunaan, dengan indikator jumlah nasabah penerima kredit Ultra Mikro (UMi), 6,4 juta orang (95%) penerima program UMi adalah perempuan. Selanjutnya dari dimensi kualitas, dengan indikator berupa indeks literasi keuangan, indeks literasi perempuan lebih tinggi dibanding indeks literasi laki-laki.

Sementara itu, dari dimensi jangkauan akses, dua indikator, yaitu persentase kepemilikan telepon seluler dan jumlah pengguna internet, perempuan masih tertinggal dibanding laki-laki. Hal ini menunjukkan masih adanya kesenjangan digital, sehingga diperlukan literasi digital bagi perempuan. Melalui fungsi pengawasan, DPR RI terutama Komisi VIII dan Komisi I perlu terus mendorong pemerintah untuk meningkatkan literasi digital pada perempuan.

## Referensi

- Indonesia. Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan. (tanpa tahun). *Keuangan Inklusif*. Kemenkeu.go.id. <https://fiskal.kemenkeu.go.id/fiskalpedia/2021/06/08/132003945795316-keuangan-inklusif>.
- Indonesia. Badan Pusat Statistik. (2023). *Perempuan dan Laki-laki di Indonesia 2023*.
- Indonesia. Badan Pusat Statistik. (2022a). *Persentase Penduduk Miskin Maret 2022 turun menjadi 9,54 persen*. Bps.go.id.

- <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2022/07/15/1930/persentase-penduduk-miskin-maret-2022-turun-menjadi-9-54-persen.html>.
- Indonesia. Badan Pusat Statistik. (2022b). Persentase Penduduk yang Hidup di Bawah Garis Kemiskinan Nasional, Menurut Jenis Kelamin (Persen), 2022. Bps.go.id. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTUZOCMy/persentase-penduduk-yang-hidup-di-bawah-garis-kemiskinan-nasional--menurut-jenis-kelamin.html>.
- Indonesia. SNKI. (2017, Oktober 30). Strategi Nasional Keuangan Inklusif. Snki.go.id, <https://snki.go.id/strategi-nasional-keuangan-inklusif/>.
- Indonesia. SNKI. (2022, Desember 30). SNKI Perempuan, Solusi Pemulihan Keuangan Perempuan Pascapandemi. Snki.go.id. <https://snki.go.id/snki-perempuan-solusi-pemulihan-keuangan-perempuan-pasca-pandemi/>.
- Indonesia. Kementerian Keuangan. (2022, Agustus 10). Debitur Perempuan Mendominasi Pembiayaan Ultra Mikro (UMi). Kemenkeu.go.id. <https://pip.kemenkeu.go.id/berita/31/debitur-perempuan-mendominasi-pembiayaan-ultra-mikro-umi#>.
- Mutiarasari, Kanya Anindita. (2024, Februari 02). Hari Perempuan Internasional 8 Maret 2024, Ini Tema Peringatan Tahun Ini. Detik.com. <https://news.detik.com/berita/d-7174107/hari-perempuan-internasional-8-maret-2024-ini-tema-peringatan-tahun-ini>.
- Patnistik, Egidius. (2022, November 09). Meningkatkan Peran Perempuan Dalam UKM Melalui Pembiayaan UMi. Kompas.com. <https://money.kompas.com/read/2022/11/09/145442426/meningkatkan-peran-perempuan-dalam-ukm-melalui-pembiayaan-umi?page=all>.
- Rizkinaswara, Leski. (2020, Juli 01). Literasi Digital Kurangi Kesenjangan Akses Digital Perempuan. Kominfo.go.id. <https://aptika.kominfo.go.id/2020/07/literasi-digital-kurangi-kesenjangan-akses-digital-perempuan/>.
- Suryarandika, Rizky. (2022, April 24). Menteri PPPA: Perempuan Alami Kesenjangan Digital. Republika.co.id. <https://news.republika.co.id/berita/rattri396/menteri-pppa-perempuan-alami-kesenjangan-digital>.